

**ANALISIS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS) DALAM MENYEDIAKAN RUMAH LAYAK HUNI
DI KELURAHAN BEROHOL KECAMATAN BAJENIS
KOTA TEBING TINGGI**

Dewi Herlina

UIN Sumatera Utara Medan
dherlina43@gmail.com

Zuhrinal M. Nawawi

UIN Sumatera Utara Medan
zuhrinal.nawawi@uinsu.ac.id

Tuti Anggraini

UIN Sumatera Utara Medan
tuti_anggraini@uinsu.ac.id

Abstract: This study aims to determine the implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) in providing livable houses in Berohol Village, Bajenis District, Tebing Tinggi City. Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) is a government facility in the form of stimulant assistance for the construction / improvement of housing quality provided to low-income people. Low-Income Communities (MBR) are people who have limited purchasing power so they need government support to get a decent house to live in. Self-Help Housing are houses built on the initiative and efforts of the community, either individually or in groups. This type of research is a descriptive qualitative research. In collecting research data using interview techniques, observation, and documentation using informants as a source of information. The results of this study indicate that the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in providing Liveable Homes in Berohol Village, Bajenis District, Tebing Tinggi City has not been optimal. Including the distribution of BSPS that has not been on target, lack of participation and public awareness and lack of knowledge about the BSPS program. In addition, in the development stage, it should be carried out cooperatively with fellow groups that have been determined but in reality it is still done individually. Researchers also see that the implementors in the implementation of the BSPS Program in Kelurahan Berohol still do not have firmness because they still allow the community to work individually. Even though they understand what the concept and purpose of the BSPS program actually is.

Keywords: Livable, Self-help housing, Stimulant program

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyediaan rumah layak huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah yang berupa bantuan stimulant untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat

yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Perumahan Swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan informan sebagai sumber informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam menyediakan rumah Layak Huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi belum berjalan optimal. Termasuk penyaluran BSPS yang belum tepat sasaran, kurangnya partisipasi serta kesadaran masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang program BSPS. Selain itu dalam tahap pembangunan yang seharusnya dilakukan secara bergotong royong dengan sesama kelompok yang telah ditentukan tetapi pada kenyataannya masih dilakukan secara individual. Peneliti juga melihat bahwa implementor dalam pelaksanaan Program BSPS di Kelurahan Berohol masih belum memiliki ketegasan karena masih membiarkan masyarakat bekerja secara individual. Padahal mereka mengerti apa sebenarnya konsep dan tujuan program BSPS.

Kata Kunci: layak huni, perumahan swadaya, program stimulan

Pendahuluan

Pada dasarnya rumah merupakan satu kebutuhan primer setelah pangan dan sandang terpenuhi. Setelah manusia memenuhi kebutuhan primer sebagai kebutuhan pokok manusia, baru manusia memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Selain sebagai pelindung dari segala cuaca dan gangguan alam juga makhluk lainnya rumah juga memiliki fungsi yaitu sebagai pusat pendidikan keluarga, pusat persemaian budaya dan sebagai peningkatan kualitas generasi muda suatu bangsa. Kebutuhan pokok terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spriritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Pengertian tersebut menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Pembahasan kebutuhan rumah tidak akan terlepas dari pembahasan backlog, secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai suatu kondisi kesenjangan antara rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan kata lain backlog perumahan adalah kuantitas rumah yang belum tertangani. Tidak dipungkiri bahwa peningkatan angka backlog perumahan sangat dipengaruhi oleh adanya penambahan populasi penduduk disuatu daerah setiap tahunnya yang mana disetiap daerah jumlah kependudukannya tidaklah sama. Ada lima jenis kebijakan dalam memecahkan masalah kawasan kumuh:

1. Sikap *laissez fair*, pemerintah membiarkan dibangunnya perumahan liar mengikuti permainan ekonomi; 2. *Alalmis approach*, pendekatan yang memandang bermunculan gubug gubug reyot kaum papa sebagai ancaman; 3. Pendekatan *sesisi* (*partical approach*), pemerintah membiarkan subsidi kepada perusahaan swasta yang mendirikan perumahan bagi penduduk yang mampu membayar secara kredit; 4. *Total approach*, pendekatan yang menyeluruh, pemerintah mendirikan secara besar-besaran perumahan untuk kaum ekonomi lemah; 5. Pendekatan *progresif* (*progresif approach*), pemecah bersama penghuninya (Harahap: 2015).

Menurut data Kementerian PUPR per 8 Maret 2019, jumlah backlog sebanyak 7,6 juta unit. Pada tahun 2015, ada 699.770 unit rumah yang dibangun sebanyak 65 persen untuk MBR dan 35 persen untuk non-MBR. Kemudian pada tahun 2016 terbangun lagi total 805.169 unit rumah sebesar 71 persen untuk MBR dan 29 persen untuk non-MBR. Berikutnya, sebanyak 904.758 unit rumah berhasil dibangun pada 2017, dengan porsi 75 persen untuk MBR dan 25 persen untuk non-MBR. Selanjutnya pada tahun 2018, pencapaiannya 1.132.621 unit rumah yang diperuntukkan MBR sebanyak 70 persen dan non-MBR 30 persen. Memasuki awal tahun 2019, Ditjen penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mengklaim bahwa hingga 11 februari 2019 telah terbangun 77.326 unit rumah, dengan rincian 65.875 unit untuk MBR dan 11.469 unit non-MBR.

Dalam menangani permasalahan backlog rumah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bantuan ini merupakan pengungkit keswadayaan masyarakat dalam berbagai bentuk baik berupa tambahan dana, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Diharapkan bantuan ini dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan baik dari penerima bantuan itu sendiri, keluarga dan kerabat penerima bantuan, tetangga, maupun lingkungan sekitar, sehingga sejumlah bantuan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yaitu berupa sejumlah dana untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah. Perumahan swadaya merupakan rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok program ini memiliki tujuan yaitu untuk memberdayakan

masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Salah satu daerah pelaksanaan Program BSPS ini adalah Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. Menurut pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Setempat Program ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan Pemko Tebing Tinggi kepada warga miskin guna memperbaiki kehidupannya.

Namun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya di kelurahan Berohol yaitu masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara. Akibatnya, masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak, bahwa penerima BSPS di Kelurahan Berohol rata-rata merupakan warga yang berkecukupan dalam hal ekonomi sedangkan warga yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dan dikatakan lebih layak menerima bantuan BSPS namun tidak mendapat bantuan tersebut padahal ikut dalam pengajuan. Implementor dalam pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Berohol ini masih belum memiliki ketegasan karena masyarakat masih dibiarkan bekerja secara individual dan cenderung apatis terhadap hal tersebut. Padahal mereka mengerti apa sebenarnya konsep dan tujuan program BSPS yaitu untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat agar mandiri dan berdaya guna. Implementor baik dari Dinas perkim maupun fasilitator belum mampu mengajak masyarakat sadar dan faham dengan konsep dari BSPS walaupun sudah dilakukan sosialisasi sebelumnya.

Bagaimana Hasil analisis pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil analisis pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam menyediakan rumah layak huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing.

Kajian Literatur

Kesejahteraan Sosial

Secara etimologis, kata kesejahteraan terbentuk dari kata sejahtera yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera berarti aman, sentosa dan makmur. Selamat dari berbagai macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Dengan demikian kesejahteraan sosial adalah keadaan masyarakat yang sejahtera yakni masyarakat yang aman secara sosial, terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem sosial.

Jadi dapat dipahami bahwa, kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya.¹⁴ Kesejahteraan sosial dapat difahami sebagai program pelayanan maupun pertolongan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan sebagai sebuah disiplin akademik, kesejahteraan sosial mengacu kepada suatu studi terhadap lembaga, program maupun kebijakan yang fokus pada pelayanan kepada masyarakat.

Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta, atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari lima tujuan ini di bagi menjadi beberapa tingkat yaitu: 1. Kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal; 2. Kebutuhan sekunder yang terdiri dari semua kegiatan dalam hal hal vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup; 3. Kebutuhan tersier mencakup kegiatan dalam hal hal lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, yang terdiri dari hal hal yang melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu pilihan tindakan pemerintah, biasanya bersifat mengatur, baik dilakukan pemerintah atau melibatkan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik juga diartikan sebagai suatu hukum. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi harus dipahami secara benar. Artinya ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.

Kebijakan publik senantiasa berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik, baik hubungannya secara positif/aktif (dikerahkan sumber daya untuk suatu isu) maupun negatif/pasif (tidak dikerahkan sumber daya untuk suatu isu, agar tersedia dan dapat digunakan untuk isu lainnya). Dari pandangan ini, Wibawa juga menegaskan bahwa negara dalam konteks ini bukan harus dihentikan dengan wilayah yang luas seperti Indonesia. Namun yang patut ditekankan adalah wilayah yang memiliki pemerintah yang didalamnya terjadi pengaturan untuk hidup bersama (Setyawan, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat salah satu program pemerintah yakni, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan oleh pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai upaya meningkatkan kualitas Rumah Layak Huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi.

Kebutuhan Rumah/ Papan

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan. Berdasarkan Habitat for Humanity Indonesia, terdapat 3 point penting yang harus kita ketahui dan terapkan sebagai syarat sebuah rumah bisa dikatakan sebagai rumah layak huni.

1. Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan Point pertama yang harus kita ketahui sebagai salah satu syarat rumah layak huni adalah keselamatan bangunan. Hal ini bisa kita capai dengan menerapkan standar mengenai struktur bangunan yang terdiri dari struktur bawah bangunan atau pondasi, struktur tengah bangunan atau ring balk, serta struktur atas bangunan atau atap. Keselamatan bangunan dapat tercapai jika kita menerapkan standar kualitas dengan kompetensi bangunan yang tertuang dalam sertifikasi dan standarisasi. Dengan penerapan standar tersebut, peluang terjadinya kegagalan bangunan bisa terminimalisir; 2. Menjamin Kesehatan Bagi Para Penghuninya, Hal ini dapat kita capai dengan menerapkan standar pencahayaan, ppenghawaan dan fasilitas sanitasi bangunan; 3. Memenuhi Kecukupan Luas Minimum, Sebuah rumah yang memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah terdiri dari ruang tidur atau ruang serba guna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi

Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kebijakan perumahan dan permukiman di Indonesia pada awalnya awalnya atau sebelum merdeka (Pra Kemerdekaan) masih terbatas pada penyediaan perumahan hanya untuk pegawai negeri, rumah sewah dan perbaikan lingkungan dalam rangka kesehatan. Sementara pelaksanaan lebih lanjut mengenai kebijakan perumahan dan permukiman masyarakat pada waktu tersebut dijalankan melalui *Burgerlijke Woningenregeling 1934* yang pelaksanaannya menggunakan *Algemene Voorwaden voor de uitvoering bij aaneming van Openbare Werken* in indie 1941 serta *Indische Comptabiliteits wet*. Pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukan oleh *Departement Van Vekerr en Waterstaat* yang menangani perumahan rakyat (*volkshuiving*) dan bangunan gedung rumah tangga (Yosita, 2012).

Tujuan pokok pembangunan permukiman dan perumahan adalah meningkatkan kesediaan rumah dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, dan meningkatkan sistem permukiman yang teratur, layak huni, budaya, ramah lingkungan, dan efisien, yang dapat mendukung, produktifitas dan kreativitas masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang engalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi. Mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya pada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-

barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Sugart0, 2005).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2011 pasal satu tentang perumahan, rumah adalah Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sebagai sarana pembinaan keluarga, harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Rumah sangat berfungsi penting bagi setiap individu maupun keluarga. Jadi dalam mewujudkan rumah yang sesuai dengan fungsinya tersebut perlu adanya dorongan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 88 Tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dimana dalam pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.13/PRT/M2016 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan ini merupakan salah satu program Bantuan sosial pemerintah pusat di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan dana yang bersifat material bangunan.

Tujuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah: 1. Menyediakan instrument penyelenggaraan perumahan swadaya yang dapat di acu oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung, memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan lingkungan secara swadaya; 2. Menyediakan program dan kegiatan yang dapat membantu mendorong, memfasilitasi dan mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilakukan secara swadaya; 3. Mempercepat tersedianya rumah layak huni dalam lingkungan sehat, tertib, aman dan nyaman dengan cara terjangkau. Adapun sasaran fungsional kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya adaah terselenggaranya pemberian dukungan, dorongan, fasilitasi, bagi pembangunan dan pengembangan perumahan swadaya secara tertib, tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu serta berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Observasi (pengamatan) adalah langkah awal dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena. Sasaran dari observasi ini ialah untuk menemu kenali adanya masalah yang dihadapi. Dalam proses ini penulisan melakukan wawancara yang tidak berstruktur yaitu melakukan wawancara yang bersifat bebas (berbincang-bincang) dengan kepala Bidang dinas Perkim dan orang penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya serta dokumentasi yaitu dengan mencatat data yang ada pada dokumen dokumen, nuku pedoman dan arsip yang ada pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tebing Tinggi serta foto foto yang mendapat bantuan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2008).

1. Reduksi Data (*data reduction*) Mereduksi data berarti marangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting.
2. Penyajian Data (*data display*) Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.
3. *Concluding Drawing/ verification data* yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Kelurahan Berohol

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu pemerintahan kota dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Tebing Tinggi adalah 38,438 km² dan terbagi atas 5 Kecamatan diantaranya: Kecamatan Rambutan, padang Hilir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kecamatan Hulu, dan Kecamatan Bajenis. Serta Kota Tebing Tinggi terdiri dari 7 Kelurahan yaitu Kelurahan Teluk Karang, Kelurahan pinang Mancung, Kelurahan Bandar Sakti, Kelurahan Bulian, Kelurahan Bandar sakti, Kelurahan Pelita dan Kelurahan Berohol. Kelurahan Berohol merupakan kelurahan yang terletak dikecamatan bajenis kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 2.4660 Km² yang berkembang sebagai permukiman jasa dan perdagangan. Kelurahan berohol terdiri dari 5 lingkungan.

Standar dan sasaran Kebijakan

Dalam menjalan suatu Program perlu adanya standard dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur agar bisa terealisasi. Apabila standard an sasaran kebijakan kabur, maka akan menimbulkan konflik diantara para pelaksana. Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) merupakan bantuan bersifat stimulant yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/meningkatkan kualitas rumahnya. Rumah swadaya merupakan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan Program Bantuan stimulant Perumahan Swadaya di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis penyalusan BSPS masih belum bisa dikatakan tepat sasaran. Dimana rata rata penerima bantuan merupakan masyarakat yang berkecukupan dalam hal ekonomi dan memiliki bangunan rumah yang layak, hal tersebut tentu lari dari tujuan dan sasaran dari program BSPS ini. Dimana Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah serta meiliki rumah yang tidak layak untuk ditempati.

Kemudian dalam pelaksanaan Program BSPS di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat. Peneliti juga melihat bahwa Implementor dalam pelaksanaan Program BSPS di Kelurahan Berohol masih belum memiliki ketegasan karena masyarakat masih dibiarkan bekerja secara individual. Padahal mereka mengerti dan faham maksud konsep

dan tujuan program BPS ini yaitu untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat agar bisa mandiri dan berdaya guna.

Sumber Dana

Selain sumber daya manusia, diperlukan juga adanya sumber daya lain, seperti dukungan dana untuk biaya peningkatan kualitas rumah. Sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di tahun 2019 berasal dari APBN. Pencairan dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi diberikan kepada penerima dalam bentuk bahan material. Prosedur pencairan dana berpatokan dengan Peraturan Kementerian Perumahan Rakyat No.13/PRT/M2016 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu: Pencairan dana Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya dilakukan 2 tahap. Tahap pertama sebesar 50% dari jumlah bantuan dan tahap kedua diberikan sebesar 50% dari jumlah bantuan setelah pekerjaan direalisasikan paling rendah 30% pembangunannya.

Hasil pengamatan peneliti sumber daya Pelaksanaan program Bantuan stimulant Perumahan Swadaya di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi yakni sumber daya manusia meliputi staff Dinas Perkim, Staff Kelurahan, Fasilitator serta masyarakat baik masyarakat dari kelompok sasaran maupun masyarakat umum. Sumber daya dengan konsep yang melekat pada kegiatan BSPS yaitu mengharuskan masyarakat penerima bantuan agar mampu membiasakan diri untuk mengembangkan diri sendiri dan berkelompok dalam menyelesaikan pembangunan rumah. Namun pada pelaksanaan pembangunan program BSPS terjadi masalah yaitu dalam tahap pembangunan yang seharusnya dilakukan dengan cara bergotong royong dengan sesama kelompok tapi hal tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya, pembangunan masih dilakukan secara sendiri sendiri. Sedangkan sumber daya yang berupa materi yakni dana program BSPS berasal dari APBN.

Hubungan antar organisasi

Dalam pelaksanaan suatu program di perlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara instansi demi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran dan tujuan. Kordinasi ini dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk diwilayah Kelurahan Berohol Kota Tebing Tinggi. Koordinasi ini dilakukan oleh para aktor pelaksana mulai dari tingkat

pusat, kota, hingga desa penerima. Kegiatan koordinasi merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab dari para aktor pelaksana.

Pemerintah pusat selalu memantau perkembangan pelaksanaan Program Bantuan stimulant Perumahan swadaya (BSPS). Melalui sering diberikannya briefing, semua perubahan informasi, ataupun masalah yang dihadapi akan diketahui dan akan dicarikan solusi. Kegiatan seperti ini memang penting agar program yang di gagas oleh pemerintah benar benar mampu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan rakyat. Pola hubungan antara Fasilitator dan Dinas Perkim diawali melalui tahap penyeleksian para calon penerima bantuan. Kepala Desa memberikan usulan rumah rumah tidak layak yang ada di desanya, kemudian data tersebut diseleksi oleh dinas perkim, dinas perkim berkoordinasi dengan fasilitator lapangan dalam menentukan calon penerima bantuan. Setelah data di verifikasi, dinas kepala desa serta fasilitator melakukan sosialisasi/pembekalan terhadap masyarakat.

Menurut pengamatan peneliti, hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan Swadaya di Kelurahan Berohol sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari respon mereka mengenai BSPS di Kelurahan Berohol. Selain itu pelaksanaannya dilaksanakan secara terbuka sehingga tidak menyebabkan bias dalam komunikasi dan penyampaian informasi.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Dampak sosial yaitu perubahan yang terjadi pada manusia, misalnya interaksi atau hubungan antar individu yang terjadi setelah adanya suatu program. Masyarakat penerima bantuan merasa senang dan terbantu dengan adanya program BSPS. di sisi lain program ini juga menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat yang disebabkan karena sebagian dari penyaluran bantuan ini tidak tepat sasaran.

Dari pengamatan yang peneliti lakukan di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, kondisi ekonomi penerima Bantuan rata rata masyarakat yang memiliki rumah gedung dan masih berkecukupan dalam hal ekonomi. penerima Bantuan yang tepat sasaran yakni masyarakat yang berpenghasilan rendah dan jauh dari kata berkecukupan.

Adapun manfaat atau dampak dari pelaksanaan BSPS ini bagi penerima bantuan berdasarkan data yang peneliti dapatkan maka dapat disajikan secara ringkas sebagai berikut (1) mengurangi beban hidup masyarakat miskin, karena tidak lagi memiliki

tanggungan untuk memperbaiki rumah, (2) meningkatkan kepercayaan diri, (3) meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, karena dana yang seharusnya digunakan untuk membangun rumah bisa di alokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup lainnya, seperti pendidikan, modal usaha, dan peningkatan kualitas sandang dan pangan, (4) dengan rumah yang sudah memenuhi kriteria layak huni, maka akan meningkatkan kualitas kesehatan dan memberikan rasa aman untuk penghuninya. (6) berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Selain itu dampak negatif yang muncul dalam pelaksanaan BSPS di Kelurahan Berohol yaitu terjadinya kecemburuan sosial antar masyarakat karena penyaluran bantuan BSPS masih belum tepat sasaran.

Kesimpulan

Standar dan Sasaran Kebijakan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya mengacu kepada peraturan Menteri PUPR No.13/PRT/M2016 peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Terdapat masalah dalam penetapan calon penerima bantuan di Kelurahan Berohol yaitu adanya ketidak jujuran dalam pemilihan rumah yang akan di rekomendasikan sebagai calon penerima bantuan. Seharusnya kebijakan program BSPS disusun dengan kenyataan yang ada dilapangan bahwa masyarakat belum mampu untuk berswadaya dalam melakukan pembangunan rumah. Sumber Daya Dengan konsep yang melekat pada kegiatan BSPS yaitu mengharuskan masyarakat penerima bantuan agar mampu membiasakan diri untuk mengembangkan diri sendiri dan berkelompok dalam menyelesaikan pembangunan rumah. Namun dalam pelaksanaan program BSPS terdapat masalah dimana dalam tahap pembangunan yang seharusnya dilakukan secara bergotong royong dengan kelompok tapi pada kenyataannya masih di lakukan sendiri sendiri. Sumber dana dalam Program BSPS di Kelurahan Berohol Berasal dari APBN dengan rincian setiap rumah diberi Rp. 17. 500.000.

Dampak sosial ekonomi Program BSPS mampu menjadikan kondisi kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Dikarenakan rumah yang semula adalah rumah yang tidak layak untuk di huni dan lingkungan yang kurang baik setelah dilakukan perbaikan rumah rumah tersebut sekarang sudah menjadi lebih tertata dan sehat. Kesehatan yang

meningkat akhirnya secara perlahan juga berdampak kepada perubahan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung menekan biaya hidup penerima bantuan terutama pada biaya untuk perbaikan rumah, karena rumah tersebut sudah dalam kondisi yang sudah layak. Dengan terpenuhinya kebutuhan akan perumahan maka para penerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup lainnya seperti kesehatan, pendidikan, atau peningkatan kualitas sandang dan papannya sehingga hal itu juga menjadikan taraf hidupnya meningkat.

Dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam lagi kepada masyarakat tentang konsep dari program BSPS agar tidak terjadi kesalahan kesalahan dalam pembangunan. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seharusnya sebelum dilaksanakannya program masyarakat khususnya calon penerima bantuan diberikan pelatihan khusus agar masyarakat bisa mandiri dan tidak menyerahkan semua kepada pengurus. Koordinasi dan komunikasi antara dinas perkim, fasilitator serta masyarakat agar bisa lebih terbuka lagi supaya tidak terjadi kesalah atau miss-komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Isnaini. et. Al. (2015). *Analisis Tingkat kesenjangan Pendapatan pada masyarakat Tebing Tinggi*. Medan:FEBI UIN-SU Press.
- Sugarto, Edi.. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Ravika Adimatama.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Yosita, Lucy., et al. (2012). *Strategi Perencanaan dan Perancangan Perumahan pada era Kontemporer*, Yogyakarta: Deepublish.